

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung, PT Refika Aditama, 2017.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- Amrizakar, *Tabir Kesaktian Akta Notaris*, Depok, Khalifah Mediatama, 2020.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, UII Press, 2009.
- Autopo, Arisento Adi dan Adrianys Arif, *Terampil Mengolah Data Kualitatif*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010.
- Boediarto, M. Ali, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*, Jakarta, Swa Justitia, 2005.
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2016.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan, 2008.
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Kencana, 2014.
- Indra, M. Ridhwan R.A., *Ragam Perjanjian di Indonesia*, Jakarta, CV. Trisula, 1996.
- Khairandy, Ridwan, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)*, Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Kie, Tan Thong, *Studi Notariat & Serba-serbi Praktek Notaris*, Jakarta, PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2011.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004.

- _____, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1994.
- Mustofa, *Tuntunan Pembuatan Akta-akta PPAT*, Yogyakarta, KaryaMedia, 2014.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Nurasa, Akur dan Dian Aries Mujiburohman, *Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah*, Yogyakarta, STPN Press, 2020.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Bandung, Penerbit Mandar Maju, 2000.
- Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Bina Cipta, 1979.
- Simanjuntak, P.N.H., *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pers, 2006.
- Subekti, R., *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Thamrin, Husni, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2011.

B. Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* 1847-23).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344)

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630).
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 395).
- Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953).

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Halaman 3).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Petunjuk Teknis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3/Juknis-HK.02/IV/2022 tentang Layanan Pengecekan Sertifikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Secara Elektronik tanggal 25 April 2022.

C. Karya Ilmiah

Auf, Masrur, “Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Tanah Berdasarkan UUJN”, Yogyakarta, *Tesis*, Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2012.

Sitepu, Raymond Nata, “Pembatalan Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan PPAT (Studi Kasus Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Rap dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 53/Pdt/2015/PT.Mdn), Medan, *Tesis*, Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018.

Wardhani, Ihdina Yulia, “Pembatalan Akta Jual Beli Tanah yang Belum Didaftarkan Berdasarkan Kesepakatan Penjual dan Pembeli Menurut Hukum Positif Indonesia”, Yogyakarta, *Tesis*, Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2013.

D. Jurnal

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Contrarius Actus”, *Majalah Konstitusi*, Nomor 126, Agustus, 2017, hlm. 78.

Maria, Jenifer, “Pembatalan Akta Notariil Oleh Notaris”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala*, Volume 4, Nomor 4, November, 2020, hlm. 412.

Muhtarom, M, “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak”, *SUHUF*, Volume 26, Nomor 1, Mei, 2014, hlm. 52.

Purwanto, Harry, “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional”, *Mimbar Hukum*, Volume 21, Nomor 1, Februari, 2009, hlm. 162.

E. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Daring), dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Munawaroh, Nafiatul, “Mengenal Frasa Demi Hukum dan Batal Demi Hukum”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-frasa-demi-hukum-dan-batal-demi-hukum-lt4fff97aad74a5/>, (diakses tanggal 2 Mei 2024).

Oktavira, Bernadetha Aurelia, “Perbedaan antara Perikatan dan Perjanjian”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perikatan-dan-perjanjian-lt4e3b8693275c3/>, (diakses tanggal 01 Juni 2023).

Purnamasari, Irma Devita, “Akta Notaris Sebagai Akta Otentik”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akta-notaris-sebagai-akta-otentik-lt550c0a7450a04/>, (diakses tanggal 19 September 2022).

Tim Hukumonline, “5 Asas-Asas Hukum Perdata terkait Perjanjian”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-perdata-lt62826cf84ccbf/>, (diakses tanggal 01 Juni 2023).

F. Wawancara

Andi Reza Fitriani E.S., 2023, Pembatalan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah dengan Akta Notariil Karena Adanya Cacat Administrasi (Studi Kasus Pembatalan oleh Notaris/PPAT X di Kabupaten Kulon Progo), Yogyakarta, 29 Maret.

Heri Sabto Widodo, 2023, Pembatalan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah dengan Akta Notariil Karena Adanya Cacat Administrasi (Studi Kasus Pembatalan oleh Notaris/PPAT X di Kabupaten Kulon Progo), Yogyakarta, 27 Juli.

Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M., 2023, Pembatalan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah dengan Akta Notariil Karena Adanya Cacat Administrasi (Studi Kasus Pembatalan oleh Notaris/PPAT X di Kabupaten Kulon Progo), Yogyakarta, 20 Juli.

Notaris/PPAT X, 2023, Pembatalan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah dengan Akta Notariil Karena Adanya Cacat Administrasi (Studi Kasus Pembatalan oleh Notaris/PPAT X di Kabupaten Kulon Progo), Yogyakarta, 09 Februari.

Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum., 2023, Pembatalan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah dengan Akta Notariil Karena Adanya Cacat Administrasi (Studi Kasus Pembatalan oleh Notaris/PPAT X di Kabupaten Kulon Progo), Yogyakarta, 07 Juni.